

SKRIPSI

**KEPATUHAN KANDIDAT TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN
PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020 DI TENGAH
PANDEMI COVID-19**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi
Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik
Universitas Hasanuddin**

Oleh :

SYANIRAH MUH SYAMSIAR

E041171001

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**KEPATUHAN KANDIDAT TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN
PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020 DI TENGAH
PANDEMI COVID-19**

Disusun dan diajukan Oleh:

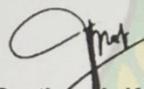
SYANIRAH MUH SYAMSIAR

E041171001

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Yang Dibentuk Dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 12 Agustus 2021 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.
NIP. 197308131998022001


Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.
NIP. 199205022019044001

Mengetahui,

Ketua Departemen

Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D
NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**KEPATUHAN KANDIDAT TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN
PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020 DI TENGAH
PANDEMI COVID-19**

Disusun Oleh:

SYANIRAH MUH SYAMSIAR

E041171001

dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada
Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Makassar, Kamis 12 Agustus 2021

Menyetujui,

Panitian Ujian

Ketua	: Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.	(.....)
Sekretaris	: Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.	(.....)
Anggota	: Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si.	(.....)
Anggota	: Dr. Muhammad Saad, MA.	(.....)
Pembimbing 1	: Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.	(.....)
Pembimbing 2	: Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.	(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini;

Nama : Syanirah Muh Syamsiar
NIM : E041171001
Program Studi : Ilmu Politik
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

“Kepatuhan Kandidat Terhadap Protokol Kesehatan Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 202 Di Tengah Pandemi COVID-19” adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan karya tulis orang lain maupun terjemahan dari karya tulis orang lain. Skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Agustus 2021

Yang menyatakan



Syanirah Muh Syamsiar
NIM : E041171001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya. Serta tak lupa Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kepatuhan Kandidat Terhadap Protokol Kesehatan Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020 Ditengah Pandemi COVID-19”**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan yang dikarenakan atas keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan tulisan ini yang kiranya kelak dapat bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

2. Bapak **Prof. Dr. Armin, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak **Drs. H. A. Yakub, M.Si, P.hD** selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si** selaku pembimbing I dan ibu **Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP** selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen pengajar **Alm. Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, M.A; Alm. Prof. Basir Syam, M.Ag; Prof. Dr. Armin. M.Si; Prof. Muhammd, M.Si; Dr Muhammad Saad. MA; H. A. Yakub, M.Si, Ph.D; A. Naharuddin, S.IP, M.Si; Dr. Phil. Sukri, M.Si; Dr. Ariana Yunus,S.IP. M.Si; Dr. Imran M.Si; Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si; Sakinah Nadir S.IP, M.Si Endang Sari, S.IP, M.Si; Ummi Suci Fathiah B, S.IP, M.IP; Hariyanto, S.IP, M.A; Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Dian Ekawaty, S.IP, M.A** terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama ini.
6. Seluruh staf pegawai Departemen Ilmu Politik, yang senantiasa memberikan arahan dalam pengurusan berkas.

7. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Muh. Syamsiar Jufri** dan Ibunda **Syuhada** yang tidak hentinya memberikan doa, dan mencurahkan seluruh kasih sayang dan menjadi penyemangat bagi penulis.
8. Teman-teman **UKM BASIS FISIP UNHAS** yang tidak bisa saya sebutkan namanya, terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran yang telah diberikan.
9. Kawan seperjuangan di Ilmu Politik Angkatan 2017 yang telah banyak membantu sejak awal proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Kepada saudara penulis yaitu Kak Ani, Kak Ana, Kak Ical, Kak Ifah, dan Kak Nisa yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan bantuan yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Dimas Inzaghi Muzhafran S.Tr.Pel yang telah banyak memberikan bantuan serta tidak pernah lelah untuk menyemangati penulis.
12. Untuk Sasha, Samantha, dan Nisa, terima kasih telah bekerjasama dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan sekaligus menjadi teman jalan di waktu luang.

13. Sahabat-sahabat terbaikku, Airin dan Ranti yang senantiasa memberikan semangat serta menjadi penghibur disaat penatnya mengerjakan skripsi. Terima kasih selalu ada.
14. Terima kasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada para informan atas segala waktu yang diluangkan serta atas keterbukaan kepada penulis, sehingga penulis memperoleh informasi yang penulis butuhkan.
15. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Terima kasih dan mohon maaf kepada teman-teman yang tak bisa penulis tuliskan namanya satu-persatu. Akhir kata, penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, Juli 2021

SYANIRAH MUH SYAMSIAR

ABSTRAK

Syanirah Muh Syamsiar. NIM E041171001. Kepatuhan Kandidat Terhadap Protokol Kesehatan Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020 Di tengah Pandemi COVID-19. Di bawah bimbingan Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si Dan Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.

Pada Pilkada tahun 2020, pihak penyelenggara telah mengeluarkan aturan terkait tata cara berpilkada ditengah pandemi dan para kandidat selaku elite politik harus mematuhi aturan tersebut karena setiap tingkah lakunya akan ditiru oleh masyarakat. Sehingga mereka harus memberi contoh yang baik dengan mematuhi aturan protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada, khususnya pada tahapan kampanye yang rentan terjadi pelanggaran protokol kesehatan karena adanya pengumpulan massa.

Penelitian ini menggunakan tipe dan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kepatuhan kandidat terhadap aturan protokol kesehatan pada masa kampanye. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap mampu menjelaskan bagaimana penerapan aturan protokol kesehatan yang dilakukan oleh kandidat pada masa kampanye. Penulis juga melengkapi data yang telah didapatkan dengan melihat beberapa referensi tertulis. Adapun pendekatan, teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perilaku, teori elite politik dan konsep kepatuhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para kandidat telah berupaya menerapkan aturan protokol kesehatan selama masa kampanye. Meskipun di sisi lain masih banyak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh kandidat. Hal itu disebabkan karena sikap patuh yang terbentuk pada diri kandidat tidak didasari atas kesungguhan dan kemauan dirinya sendiri, melainkan adanya faktor hukuman serta keberadaan otoritas yang sah. Sehingga kepatuhan yang terbentuk adalah tipe kepatuhan *compulsive deviant* atau tipe kepatuhan yang berubah-ubah.

Kata Kunci : Kepatuhan, Elite Politik, Protokol Kesehatan.

ABSTRACT

Syanirah Muh Syamsiar. Student ID Number E041171001. Candidate Compliance with Health Protocol Rules in the 2020 Makassar Mayoral Election in the midst of the COVID-19 Pandemic. Under the guidance of Dr. Gustiana A. Kambo, M.Sc and Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.Sc.

In the 2020 Election, the organizers have issued rules regarding the procedures for regional elections in the midst of a pandemic and candidates as political elites must comply with these rules because every behavior will be followed by the community. So they have to set a good example by complying with the health protocol rules at every stage of the, especially at the campaign stage which is susceptible to health protocol violations due to mass gatherings.

This research uses descriptive qualitative type of research to describe candidate compliance with health protocol rules when committing campaign activities. Data obtaining was carried out by interviewing key informants who were considered to be able to explain how the implementation of health protocol rules was carried out by candidates during the campaign period. The author also completes the data that has been obtained by looking at several written references. The approaches, theories and concepts used in this research are behavioral approaches, political elite theory and the concept of compliance.

The results of this research indicate that hat the candidates have tried to apply the rules of the health protocol during the campaign period. Although on the other side there are still many violations of health protocols committed by candidates. This is because the obedient attitude that is formed in the candidate is not based on his own sincerity and willingness, but rather the existence of a punishment factor and the existence of a legitimate authority. So that the compliance that is formed is a compulsive deviant type of compliance or a variable type of compliance.

Keywords: Compliance, Political Elite, Health Protocol.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pendekatan Perilaku.....	10
2.2 Teori Elite Politik	13
2.3 Konsep Kepatuhan	16
2.3.1 Aspek-Aspek Kepatuhan.....	18
2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan.....	20
2.4 Telaah Pustaka	21
2.5 Kerangka Pemikiran.....	23
2.6 Skema Berpikir.....	25

BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Tipe dan Jenis Penelitian.....	26
3.2 Lokasi Penelitian.....	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	29
3.3.1 Data Primer.....	29
3.3.2 Data Sekunder.....	29
3.4 Informan Penelitian	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5.1 Teknik Wawancara.....	32
3.5.2 Teknik Pengamatan atau Observasi.....	32
3.5.3 Teknik Dokumentasi.....	33
3.6 Teknik Analisa Data	33
3.6.1 Reduksi Data	33
3.6.2 Penyajian Data.....	34
3.6.3 Penarikan Kesimpulan	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	35
4.1 Kota Makassar.....	36
4.1.1 Jumlah Penduduk Kota Makassar.....	36
4.1.2 Pemerintahan.....	38
4.1.3 Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat.....	40
4.1.4 Kebudayaan.....	41
4.2 Profil Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	47

5.1 Penerapan Aturan Protokol Kesehatan Oleh Kandidat.....	48
5.1.1 Percaya Terhadap Aturan Protokol Kesehatan Yang Berlaku.....	50
5.1.2 Menerima Aturan Protokol Kesehatan Yang Berlaku....	57
5.2 Faktor-Faktor Kepatuhan Kandidat Terhadap Aturan Protokol Kesehatan	80
BAB VI PENUTUP.....	86
6.1 Kesimpulan.....	86
6.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1 Jumlah Penduduk Kota Makassar.....	37
Tabel. 4.2 Pejabat Walikota Makassar sejak Pemerintahan Republik Indonesia.....	39
Tabel 5.1 Kepatuhan Kandidat Terhadap Protokol Kesehatan Yang Berlaku Pada Pilkada Makassar Tahun 2020.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut melaksanakan pemilihan di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, terdapat beberapa negara maju yang juga melaksanakan pemilihan umum di tengah situasi pandemi, seperti Amerika Serikat, Jerman, Selandia Baru, Korea Selatan, dan lain nya. Diantara beberapa negara yang melaksanakan pemilihan di tengah pandemi, Korea Selatan menjadi negara yang dianggap cukup berhasil karena adanya peningkatan partisipasi pemilih dan pengendalian situasi pandemi yang baik.¹ Berbagai upaya dilakukan oleh National Election Commission Korea Selatan agar pemilu dapat tetap berjalan aman meskipun situasi pandemi masih belum usai.

Pemilu yang dilakukan Korea Selatan memiliki kesamaan dengan negara lain yang juga menyelenggarakan pemilihan di tengah pandemi, yaitu adanya aturan protokol kesehatan yang harus diperhatikan pada saat melaksanakan setiap tahapan pemilihan. Namun yang membedakan hanya penerapan aturan tersebut oleh seluruh pihak. Di Korea Selatan misalnya, para kandidat diperintahkan oleh partai pengusungnya agar tidak melakukan kampanye dengan pertemuan langsung untuk

¹ <https://www.voaindonesia.com/a/mendagri-pilkada-serentak-bisa-belajar-dari-negara-lain/5509403.html/>
diakses tanggal 6 April 2021 pukul 00:45 WITA.

meminimalisir terjadinya penularan virus, sehingga para kandidat harus mengubah metode kampanye nya.

Di situasi pandemi ini, para kandidat yang bertarung di pemilu Korea Selatan lebih mengedepankan kampanye virtual. Dilansir dari saluran youtube VOA Indonesia, bahwa para kandidat yang mengikuti Pemilu Korea Selatan memanfaatkan kampanye virtual dengan membuat konten yang menarik di berbagai media sosial, bahkan beberapa kandidat berkampanye dengan cara melakukan kegiatan kerja bakti maupun penyemprotan cairan disinfektan di sekitar rumah warga. Beda halnya yang terjadi pada Pilkada di Indonesia, dimana kampanye tatap muka masih lebih diminati oleh para kandidat karena dinilai lebih efektif dibanding kampanye virtual. Sehingga para kandidat tidak melewatkan kesempatan untuk berkampanye secara langsung seperti melakukan blusukan ke rumah warga. Bawaslu Republik Indonesia telah mencatat sebanyak 91.640 kampanye tatap muka telah diselenggarakan selama 60 hari masa kampanye.²

KPU Kota Makassar secara resmi menetapkan Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi, Munafri Arifuddin-Rahman Bando, Syamsu Rizal-Fadli Ananda, dan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun sebagai calon Walikota dan calon Wakil Walikota Makassar pada tahun 2020. Ke empat pasang kandidat tersebut harus menerima kenyataan bahwa di masa pandemi ini

² <https://www.republika.co.id/berita/gkcitu428/bawaslu-kampanye-tatap-muka-capai-91640-kegiatan/> diakses tanggal 7 April 2021 pukul 23:54 WITA.

terdapat aturan protokol kesehatan yang membatasi namun tetap harus dipatuhi.

Di masa pandemi ini, KPU membagi tahapan kampanye ke dalam tiga fase. Fase pertama yaitu kampanye dengan pertemuan terbatas, tatap muka maupun dialog, serta pemasangan alat peraga. Di fase kedua, seluruh kandidat akan berkampanye dengan melakukan debat publik secara terbuka. Pada fase ke tiga, KPU memberikan kesempatan untuk melakukan kampanye melalui media massa ataupun cetak. Meskipun diizinkan untuk melakukan kampanye dengan metode pertemuan langsung namun tetap dalam jumlah yang terbatas serta mematuhi aturan protokol kesehatan sebagaimana yang ada dalam Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020, PKPU Nomor 10 tahun 2020 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam COVID-19. Aturan tersebut yang menjadi dasar hukum penerapan protokol kesehatan oleh seluruh pihak yang terlibat pada Pilkada tahun 2020.

Aturan protokol kesehatan selama mengikuti tahapan kampanye tatap muka yaitu, penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tatap muka, senantiasa menjaga jarak aman (paling kurang 1 meter), larangan berkerumun saat melakukan setiap kegiatan, adanya pembatasan jumlah peserta yang hadir dalam pertemuan terbatas maupun pertemuan tatap muka (maksimal 50 orang), serta adanya

larangan mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia.

Kebijakan terkait penerapan protokol kesehatan selama Pilkada sebagian besar telah berhasil diterapkan. Berdasarkan data dari Bawaslu yang dirilis pada 31 Oktober 2020 mencatat bahwa dari 13.646 kegiatan kampanye tatap muka yang berlangsung, Bawaslu hanya menemukan sebanyak 306 pelanggaran protokol kesehatan. Namun dari hasil monitoring selanjutnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menunjukkan grafik rata-rata kepatuhan protokol kesehatan memakai masker menunjukkan penurunan dari pekan ketiga September hingga pekan keempat Desember 2020 sebesar 28%, sementara persentase kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan menurun 20,6%.³ Kondisi dan karakter masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Pasalnya, masyarakat Indonesia masih sering kali abai terhadap protokol kesehatan. Kondisi tersebut tentu mengkhawatirkan, terlebih karena penyelenggaraan kampanye identik dengan keramaian yang dapat memicu munculnya kerumunan.

Angka pelanggaran protokol kesehatan terus bertambah hingga mendekati masa berakhirnya tahapan kampanye. Bawaslu mencatat terjadi peningkatan pelanggaran protokol kesehatan pada 10 hari terakhir

³ <https://www.beritasatu.com/kesehatan/717509/satgas-covid19-desember-2020-tingkat-kepatuhan-protokol-kesehatan-semakin-menurun/> diakses tanggal 8 April 2021 pukul 20:12 WITA.

menjelang berakhirnya masa kampanye.⁴ Hal tersebut disebabkan tingginya kegiatan tatap muka namun minimnya penerapan protokol kesehatan. Kampanye dengan metode tatap muka lebih diminati karena tidak semua masyarakat paham dengan teknologi, dan mengerti dengan konsep kampanye virtual. Adapun sanksi bagi para kandidat yang melanggar aturan terkait protokol kesehatan saat kampanye yaitu, pemberian peringatan tertulis, hingga penghentian atau pembubaran kegiatan kampanye.

Peraturan terkait penerapan protokol kesehatan tidak hanya berlaku pada tahapan kampanye, namun aturan tersebut harus dilaksanakan oleh para kandidat di seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada dan para kandidat telah berupaya menerapkan aturan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh pasangan calon Munafri Arifuddin-Rahman Bando beserta tim nya yang harus melakukan tes SWAB sebelum ikut mengantar kandidat ke kantor KPU untuk mendaftar. Selain itu, pasangan calon Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun serta Syamsu Rizal-Fadli Ananda hanya membawa kerabat dan keluarga dekatnya pada saat melakukan pendaftaran maupun pengundian nomor urut, sebagaimana peraturan dari KPU. Di tempat yang berbeda, pasangan Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi terpaksa harus menyiapkan lokasi di 15 kecamatan sebagai area nonton bersama bagi seluruh pendukungnya pada saat pengundian nomor urut agar tidak terjadi kerumunan massa.

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/05/16043601/10-hari-terakhir-bawaslu-temukan-458-kampanye-langgar-protokol-kesehatan?page=all> diakses pada tanggal 8 April 2021 pukul 15:23 WITA.

Upaya penerapan protokol kesehatan telah dilalui oleh seluruh kandidat selama mengikuti tahapan penyelenggaraan Pilkada. Namun tetap saja terdapat kendala yang dihadapi oleh para kandidat. Salah satunya disebabkan karena kehadiran pendukung yang ingin menyaksikan ataupun memberikan dukungannya secara langsung kepada para kandidat yang mengikuti tahapan Pilkada. Kehadiran pendukung atau simpatisan dari masing-masing kandidat merupakan hal yang biasa terjadi. Namun karena Pilkada berlangsung di tengah pandemi, maka seluruh kandidat harus mengimbau pendukungnya agar tidak ikut menyaksikan langsung atau melakukan iring-iringan yang akan mengumpulkan banyak massa karena dikhawatirkan terjadinya penyebaran virus COVID-19. Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi pernah menjadi sorotan karena adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat mendatangi kantor KPU pada saat pendaftaran. Meskipun seluruh pendukungnya telah diimbau untuk tidak ikut mengantar, namun pendukung setia nya tetap ingin memberikan dukungan secara langsung. Pihak Danny pun mengaku bahwa kehadiran massa pendukung tersebut tidak dapat dilarang karena hadir dengan sendirinya tanpa ada paksaan ataupun pengerahan massa.

Isu tentang penerapan protokol kesehatan di Pilkada menjadi hal yang menarik karena penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi sempat menjadi perdebatan dan ditolak oleh berbagai pihak karena dinilai terlalu beresiko. Beberapa negara yang dinilai berhasil menyelenggarakan

pemilihan di tengah pandemi karena pelaksanaannya pada saat situasi pandemi sudah lebih terkendali, seperti Korea Selatan yang melaksanakan pemilu ketika tidak ada penambahan kasus baru infeksi COVID-19 di negaranya. Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, dimana Pilkada diselenggarakan saat angka positif COVID-19 terus meningkat.⁵

Sikap patuh maupun abai terhadap aturan protokol kesehatan yang ditunjukkan oleh para kandidat selama mengikuti proses Pilkada merupakan bentuk dari perilaku politik. Perilaku politik ini merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik.⁶ Penyelenggaraan Pilkada dengan aturan protokol kesehatan yang ketat merupakan bentuk keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. Pengambilan keputusan ini merupakan bagian dari konsep pokok ilmu politik yang berkenaan dengan keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat, sehingga siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada harus mengikuti aturan tersebut.

Para kandidat selaku peserta pemilihan memiliki peran yang cukup besar dalam mengendalikan situasi pandemi pada saat pelaksanaan Pilkada di Indonesia, karena adanya kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Sehingga para kandidat harus menunjukkan

⁵ <https://www.republika.co.id/berita/ghhs3c409/korsel-gelar-pemilu-saat-covid-mereda-indonesia-sebaliknya/> diakses tanggal 8 April 2021 Pukul 19:42 WITA.

⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo, 1992.

kepatuhannya terhadap aturan protokol kesehatan sebagai bentuk menghormati hak atas kesehatan maupun hak atas rasa aman yang dimiliki oleh setiap warga negara. Berdasarkan latar belakang tersebut yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Kepatuhan Kandidat Terhadap Protokol Kesehatan Pada Pemilihan WaliKota Makassar Tahun 2020 di Tengah Pandemi COVID-19.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

Bagaimana penerapan aturan protokol kesehatan yang dilakukan oleh para kandidat selama tahapan kampanye di pemilihan Walikota Makassar tahun 2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan aturan protokol kesehatan yang dilakukan oleh para kandidat selama tahapan kampanye pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Bahan informasi ilmiah bagi para peneliti lain yang ingin mengkaji perilaku elite politik dalam menghadapi aturan ditengah kondisi bencana nonalam.
- b. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku patuh para elite politik terhadap suatu aturan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak penyelenggara pemilihan umum dalam menyusun strategi sosialisasi dalam meningkatkan kepatuhan para peserta pemilihan terhadap aturan yang ditetapkan.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi para kandidat beserta tim pemenangan nya agar dapat meningkatkan kepatuhan nya terhadap aturan protokol kesehatan yang berlaku .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sehubung dengan pembahasan sebelumnya, maka pada Bab ini akan memperjelas penelitian dari aspek teoritis. Agar permasalahan dapat dijelaskan secara komprehensif, maka akan dijelaskan beberapa hal yang memiliki hubungan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.

2.1 Pendekatan Perilaku

Kerangka teoritis dalam penelitian ini akan diawali dengan urgensi pendekatan perilaku yang muncul dalam ilmu politik dalam memahami kepatuhan para elite politik terhadap protokol kesehatan di Pilkada. Pembahasan tentang kepatuhan kandidat merupakan bagian dari kajian pendekatan perilaku karena manusia sebagai gejala yang akan diamati dalam penelitian ini. Pendekatan perilaku yang ada dalam ilmu politik menganggap bahwa pembahasan mengenai lembaga-lembaga formal tidak ada gunanya karena tidak dapat memberikan banyak informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Namun dengan mempelajari perilaku manusia akan lebih bermanfaat karena manusia merupakan gejala yang dapat diamati.⁷ Pendekatan perilaku tidak hanya membahas mengenai perilaku individu namun juga dapat membahas perilaku yang mencakup kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti kelompok elite.

⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.

Manusia sebagai makhluk sosial akan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Hal tersebut yang menjadi awal mula individu membentuk sebuah kelompok, dan perilaku individu yang tergabung dalam sebuah kelompok akan membentuk perilaku kelompok. Menurut Khoiriyah (2016) perilaku kelompok adalah aktivitas yang dapat diamati dari dua atau lebih individu yang saling berinteraksi dan berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu. Terbentuknya sebuah kelompok didasari dua perspektif, yaitu perspektif fungsional dan perspektif daya tarik antarpribadi.⁸ Pada saat Pilkada, tiap elite akan membentuk sebuah kelompok berdasarkan pada perspektif fungsional, yang dimana mereka saling berinteraksi dan bergabung ke dalam suatu kelompok dikarenakan kemampuan kelompok tersebut untuk memenuhi kebutuhan akan kekuasaan para anggotanya. Kelompok tersebut nantinya akan bersaing untuk memenangkan pemilihan agar memperoleh kekuasaan yang sah.

Pada pemilihan kepala daerah, para kandidat juga dianggap sebagai representatif dari elite-elite politik yang mendukungnya, karena salah satu syarat seseorang diperbolehkan untuk mengikuti pendaftaran calon kepala daerah adalah mendapatkan rekomendasi dari partai politik atau gabungan partai politik. Di Pilkada Makassar tahun 2020, seluruh kandidat telah mengantongi dukungan dari partai politik sehingga kandidat yang bersaing tidak hanya membawa nama pribadinya namun sebagai kesatuan kelompok elite politik. Kelompok elite politik memainkan peran

⁸ Hamdi Muluk, Pengantar Psikologi Politik, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

penting dalam kehidupan bernegara sehingga perilaku yang ditunjukkan oleh kelompok tersebut akan selalu menjadi perhatian masyarakat.

Perilaku kelompok ditentukan oleh individu-individu yang ada dalam kelompok tersebut, dan setiap individu memiliki tingkah laku yang berbeda satu dengan yang lainnya. Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini membuat perilaku patuh atau tidaknya para kandidat terhadap aturan protokol kesehatan akan mencerminkan perilaku elite-elite politik yang ada di pihaknya, dan perilaku tersebut tidak terlepas dari pengaruh psikologis maupun nilai-nilai budaya yang melekat dalam diri setiap individu.

Pendekatan perilaku pada dasarnya tidak hanya menjelaskan tentang tingkah laku seseorang atau sekelompok orang, namun juga orientasinya terhadap kegiatan tersebut seperti sikap, motivasi, persepsi, evaluasi, tuntutan maupun harapan.⁹ Sehingga untuk mengetahui kepatuhan kandidat terhadap protokol kesehatan maka pendekatan perilaku dapat digunakan dalam menganalisis kasus ini. Para kandidat selaku kelompok elite politik dalam berperilaku tentu dipengaruhi atau dilatarbelakangi oleh beberapa hal seperti lingkungan sosial maupun budaya sehingga untuk mendapatkan gambaran terkait kepatuhan terhadap aturan protokol kesehatan maka hal-hal yang menjadi pertimbangan para kandidat dalam bertindak atau berperilaku dapat diamati dengan menggunakan pendekatan perilaku.

⁹ Denayu Swami Vevekananda. 2017. Perilaku Politik dan Kekuasaan Politik dalam Studi Perpindahan Partai Politik Basuka Tjahaja Purnama Dalam Perpolitikan di Indonesia, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

2.2 Teori Elite Politik

Teori elite lahir dari diskusi seru para ilmuwan sosial Amerika tahun 1950-an, antara lain Schumpeter (ekonom), Lasswell (ilmuwan politik), dan sosiolog J. Wirght Mills yang melacak tulisan dari pemikir Eropa masa awal Fasisme, khususnya Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca (Italia), Roberto Michels (Jerman), dan Jose Ortega Gasset (Spanyol). Teori elite politik lebih mengarah pada pemikiran sarjana sosiolog Italia yaitu Vilfredo Pareto. Menurut Pareto, setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik, sehingga kelompok tersebut dinamakan elite karena mampu menjangkau pusat kekuasaan.¹⁰ Sedangkan Gaetano Mosca berpendapat bahwa seseorang dapat yang menjadi elit dikarenakan memiliki kemampuan manajemen organisasi yang lebih baik dari yang lain.¹¹

Secara umum, elite politik ditujukan pada sekelompok individu yang memiliki kekuasaan maupun kedudukan yang lebih tinggi dalam suatu masyarakat. Teori elite politik ini menegaskan bahwa pada kenyataannya dalam sebuah masyarakat terdapat dua kelas, yaitu the ruling class yang berarti kelas penguasa dan the ruled yakni kelas yang dikuasai. Pada kelas penguasa terdiri dari segelintir orang yang memiliki kemampuan lebih sehingga menempati posisi untuk memerintah. Kelompok elite

¹⁰ SP. Varna, Teori Politik Modern. Terjemahan oleh Yohannes Kristiarto, dkk. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

¹¹ Ahmad Imam Mawardi. (2019). Charles Wright Mills dan Teori Power Teori Elite: Membaca Konteks dan Pemetaan Teori Sosiologi Politik Tentang Kelas Elite Kekuasaan. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Volume 4 No.2.

termasuk dalam kelas penguasa dan memiliki jumlah yang lebih sedikit dibanding kelas yang dikuasai.

Elite politik terbagi dalam dua bagian, yaitu elite politik lokal dan elite non politik lokal. Individu yang termasuk dalam elite politik lokal memiliki jabatan politik dan kekuasaan tertentu di dalam lembaga eksekutif ataupun legislatif di suatu daerah. Kedudukan maupun kekuasaan yang dimiliki oleh elite politik lokal didapatkan melalui pemilihan umum secara demokratis, sehingga elite tersebut dapat membuat kebijakan politik untuk masyarakat luas. Contohnya seperti Gubernur, Walikota, Bupati, Ketua DPRD, maupun petinggi partai politik. Sedangkan yang termasuk elite non politik lokal adalah individu yang menempati posisi tertentu dalam lingkup masyarakat dan mampu mempengaruhi orang lain agar mengikuti perintahnya. Contohnya seperti elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, dll.

Menurut Thompson, elite lokal dapat dikategorikan berdasarkan sumberdaya yang dimilikinya, yaitu elite lokal yang muncul karena memiliki kekuatan ekonomi dan elite lokal yang memiliki kekuasaan publik (Khoirudin, 2005). Masa pemilihan kepala daerah atau Pilkada ini sering dianggap sebagai ajang pertarungan para elite politik di tingkat lokal, karena kandidat yang mengikuti Pilkada merupakan bagian dari elite politik. Namun sebenarnya, bukan hanya kandidat yang merupakan elite politik tetapi terdapat elite-elite politik lainnya yang berada di balik pencalonan para kandidat, seperti petinggi-petinggi partai politik yang

mengusung para kandidat maupun elite politik yang mendukung kandidat tersebut.

Berdasarkan penjelasan tentang teori elite politik diatas, maka peneliti lebih condong menggunakan teori elite politik menurut sarjana sosiolog Italia yaitu Vilfredo Pareto karena pengertian elite politik yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah elite sebagai individu yang termasuk dalam golongan minoritas namun memiliki kualitas yang mampu membuatnya menjangkau pusat kekuasaan. Elite politik dalam hal ini adalah para kandidat maupun pihak-pihak yang telah memiliki kekuasaan dan turut serta membantu para kandidat dalam meraih kekuasaan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pemilihan kepala daerah merupakan proses untuk menemukan sosok pemimpin yang akan menjadi bagian dalam hal pembuatan kebijakan di suatu daerah. Sehingga para kandidat maupun elite-elite politik lainnya berperan penting untuk mempengaruhi orang lain agar ikut melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Sebagai elite politik, para kandidat seringkali mencuri perhatian masyarakat dan tidak sedikit masyarakat yang menjadikannya sebagai sosok panutan. Sehingga para elite politik harus mampu menjaga sikap dan tindakannya, serta senantiasa menunjukkan perilaku yang baik. Saat Pilkada di tengah pandemi, elite politik dihadapkan dengan peraturan mengenai protokol kesehatan yang dibuat oleh penyelenggara. Para kandidat selaku elite politik yang menjadi peserta pemilihan, tentu harus mengikuti segala

peraturan yang telah dibuat sebagai salah satu bukti kepatuhannya terhadap aturan yang ada. Sikap patuh yang ditunjukkan nantinya akan turut mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya di Pilkada.

2.3 Konsep Kepatuhan atau *Obedience*

Manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat memiliki tata aturan nilai dan norma sosial yang berlaku didalamnya. Seperangkat aturan tersebut harus dipatuhi sehubungan dengan diterimanya ia dalam suatu masyarakat, apabila ia tidak mematuhi tata aturan yang telah ada maka ia akan dianggap tidak normal, aneh, tidak patuh dan menyimpang.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan diartikan sebagai sifat patuh dan ketaatan. Milgram juga mendefinisikan kepatuhan sebagai sikap yang dapat menunjukkan rasa patuh seseorang dengan selalu menerima dan melakukan permintaan atau perintah dari orang lain yang memiliki otoritas (Baron dan Byrne, 2004).

Kepatuhan merupakan salah satu dampak dari pengaruh sosial lingkungan, karena manusia adalah makhluk sosial yang tindakannya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungannya. Soekanto (1982) memahami kepatuhan pada individu merupakan proses dari penanaman nilai-nilai yang bersumber dari lingkungan sosialnya seperti dari individu-individu lain dalam sebuah kelompok, yang akan mempengaruhi bagaimana seseorang dalam berpikir dan berperilaku.

¹² Nanda Purwanti dan Abdul Amin. (2016). Kepatuhan ditinjau dari Kepribadian Ekstrovert-Introvert. Jurnal Psikologi, Volume 3 No.2.

Boere (2008) berpendapat bahwa dalam kepatuhan terdapat suatu kekuasaan yang memaksa setiap individu untuk melakukan sesuatu. Agar dapat diterima dalam suatu kelompok masyarakat maka biasanya setiap individu akan berusaha menerima norma-norma atau ketentuan yang telah ada berdasarkan keinginannya sendiri, namun terkadang terdapat suatu aturan yang dimana harus diterima oleh individu secara terpaksa. Begitupun Blass (1999) yang memaknai kepatuhan sebagai sikap dan tingkah laku individu yang taat dalam arti mempercayai, menerima, mengikuti perintah ataupun permintaan orang lain serta menjalankan peraturan yang telah ditetapkan.

Peraturan dapat diartikan sebagai petunjuk, perintah, maupun segala sesuatu yang telah disepakati bersama terkait sesuatu yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan. Sedangkan menurut Rifa'i (2011), peraturan merupakan suatu tatanan dalam kehidupan masyarakat yang mengatur kehidupan setiap individu agar dapat berjalan dengan stabil. Tujuan dibuatnya peraturan yaitu untuk menciptakan suatu kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakat, serta mewujudkan lingkungan masyarakat yang teratur dan jauh dari konflik. Kepatuhan sebagai perilaku positif dinilai sebagai sebuah pilihan. Artinya individu memilih untuk melakukan, mematuhi, merespon secara kritis terhadap aturan, hukum, norma sosial, permintaan maupun keinginan dari seseorang yang memegang otoritas ataupun peran penting.¹³ Setiap individu umumnya

¹³ Anita Dwi Rahmawati. 2015. Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern, (Thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta)

memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda-beda, karena adanya faktor pendukung yang dapat membuat individu menjadi patuh maupun tidak patuh.

Konsep kepatuhan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui sikap patuh para kandidat terhadap aturan protokol kesehatan yang berlaku selama penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi. Sebagai warga negara maka sikap patuh terhadap aturan merupakan hal yang penting, karena sikap patuh dapat menjadi faktor keberhasilan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Semakin banyak masyarakat yang patuh terhadap aturan yang ada, maka kebijakan tersebut dinilai cukup berhasil dan diterima oleh masyarakat.

Kepatuhan para kandidat terhadap aturan protokol kesehatan selama tahapan kampanye dapat dilihat berdasarkan pemenuhan aspek-aspek kepatuhan yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

2.3.1 Aspek-aspek Kepatuhan

Aspek-aspek yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhan individu adalah aspek yang dikemukakan oleh Darley dan Blass (Dalam Hartono, 2006). Menurut Darley dan Blass, kepatuhan terdiri atas beberapa aspek, seperti:

a. Mempercayai (*Belief*)

Kepatuhan pada individu lebih mudah dibentuk apabila individu tersebut telah percaya bahwa tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan yang tertib. Selain

itu, individu juga percaya terhadap motif dari pihak yang memberinya perintah. Percaya bahwa dirinya mendapatkan perlakuan yang sama dan setara oleh pihak yang memberinya perintah atau dalam hal ini adalah pemimpin, serta menganggap dirinya merupakan bagian dari sebuah organisasi atau kelompok yang mengharuskannya untuk mengikuti aturan yang ada.

b. Menerima (*Accept*)

Individu yang patuh dan menerima dengan sungguh-sungguh segala bentuk perintah maupun permintaan yang telah ada dalam peraturan yang dipercayainya. Mempercayai dan menerima merupakan aspek yang berkaitan dengan sikap individu.

c. Melakukan (*Act*)

Dalam hal ini, individu dapat dikategorikan telah memenuhi aspek-aspek dari kepatuhan, apabila individu tersebut telah melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dalam arti lain, individu yang patuh adalah mampu menjalankan segala aturan dengan baik dan penuh kesadaran.

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan menggambarkan kepatuhan para kandidat terhadap aturan protokol kesehatan dengan melihat sikap yang ditunjukkan oleh para kandidat selama mengikuti tahapan kampanye dengan aturan protokol kesehatan yang ketat. Perilaku patuh dapat dilihat pada saat para kandidat mempercayai dan menerima batasan yang ada karena berlakunya aturan protokol kesehatan selama

menjalani masa kampanye. Mempercayai dan menerima berkaitan dengan sikap individu yang menganggap bahwa aturan protokol kesehatan bertujuan agar seluruh masyarakat dapat tetap merasa aman dari penyebaran COVID-19 selama penyelenggaraan Pilkada, dan untuk mengendalikan situasi pandemi di setiap daerah maka tiap kandidat yang percaya dan menerima aturan protokol kesehatan akan menjalankan aturan tersebut dengan penuh kesadaran. Kandidat yang telah mempercayai, menerima hingga menjalankan aturan protokol kesehatan dapat dikategorikan sebagai individu yang patuh terhadap aturan, karena sebagai warga negara maka para kandidat harus mematuhi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku tiap individu.

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Sears (2009) berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat membuat seseorang patuh, yaitu:

- a. Penghargaan atau ganjaran dapat memaksa individu agar bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan.
- b. Penekanan atau hukuman menjadi salah satu faktor yang dapat menekan individu untuk patuh atau mengikuti apa yang diperintahkan, karena adanya ketakutan akan mendapatkan suatu hukuman jika tidak mengikuti perintah tersebut.
- c. Otoritas yang sah dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang sesuai dengan aturan di lingkungan masyarakat.

- d. Harapan mampu membuat individu berada pada posisi yang lebih terkendali dan tiap individu tentu ingin menjadi apa yang diharapkan sehingga berusaha untuk tidak melakukan ketidaktaatan.

2.4 Telaah Pustaka

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini mencoba untuk menentukan posisi penulis meskipun penelitian yang membahas tentang kepatuhan kandidat terhadap protokol kesehatan pada Pilkada di tengah pandemi ini masih sangat terbatas, namun penulis harus tetap menentukan posisi agar terhindar dari kesamaan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Terdapat beberapa bahan bacaan yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti oleh penulis. Baik yang bersumber dari jurnal, berita online, maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

- 1) Penelitian ini bersumber dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI yang membahas tentang “*Upaya penerapan protokol kesehatan pada Pilkada serentak tahun 2020.*” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah sosialisasi kampanye selama Pilkada telah menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah, serta bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Kandidat di Pilkada serentak 2020. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat

beberapa bentuk pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh kandidat selama tahapan Pilkada di tengah pandemi, seperti terjadinya kerumunan massa pada tahap pendaftaran calon kandidat, saat pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat, hingga pada masa kampanye. Meskipun KPU selaku pihak penyelenggara Pilkada telah berupaya untuk menciptakan Pilkada serentak yang aman dari COVID-19 namun dari tulisan tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran protokol kesehatan tetap saja terjadi selama tahap pencalonan, hingga masa kampanye.

- 2) Penulis mendapatkan referensi dari catatan Komnas HAM yang berjudul *“15 hari menjelang Pilkada serentak 2020.”* Melalui tim pemantau Pilkada 2020, dalam rangka pemenuhan terhadap hak atas kesehatan dan keselamatan publik serta hak pilih dan dipilih. Ada beberapa hal yang menjadi catatan Komnas HAM, namun yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tingginya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh kandidat selama masa kampanye berlangsung, yang menyebabkan peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 pada masa kampanye. Dalam tulisan tersebut menunjukkan data informasi dan komunikasi kebencanaan BNPB kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 266.845 kasus per 25 September 2020, sementara pada masa kampanye meningkat

menjadi 497.668 kasus per 23 November 2020.¹⁴ Meskipun Bawaslu telah melakukan fungsi pengawasan seperti pemberian peringatan secara tertulis, sanksi administrasi, serta upaya pembubaran kegiatan kampanye bagi yang terbukti melanggar aturan protokol kesehatan, namun hal tersebut dianggap belum efektif, terbukti dari banyaknya catatan kasus pelanggaran yang terjadi, khususnya pada masa kampanye berlangsung. Pasalnya, kampanye yang dilakukan secara tatap muka masih diminati oleh sebagian besar peserta pemilihan.

Perbedaan kedua penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu, penulis ingin melihat kepatuhan kandidat terhadap aturan protokol kesehatan pada saat menjalani tahapan kampanye di Pilkada Kota Makassar tahun 2020, serta mengetahui faktor-faktor yang membuat kandidat patuh terhadap aturan protokol kesehatan.

2.5 Kerangka Pikir

Indonesia sebagai salah satu negara yang turut melaksanakan pemilihan di masa pandemi COVID-19. Pilkada yang diselenggarakan saat pandemi COVID-19 masih belum terkendali membuat sejumlah pihak merasa khawatir. KPU selaku penyelenggara pemilihan membuat sejumlah peraturan terkait protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta untuk menciptakan pelaksanaan Pilkada yang aman dari penyebaran COVID-19. Kondisi dan karakter masyarakat menjadi

¹⁴ [https://www.komnasham.go.id/files/20201123-keterangan-pers-nomor-047-humas-\\$TUE6.pdf/](https://www.komnasham.go.id/files/20201123-keterangan-pers-nomor-047-humas-$TUE6.pdf/) diakses tanggal 18 Januari 2021, pukul 16:48 WITA

tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Pasalnya, masyarakat Indonesia masih sering kali abai terhadap protokol kesehatan. Meskipun para kandidat telah berupaya untuk menerapkan aturan protokol kesehatan selama menjalankan tahapan penyelenggaraan di Pilkada, namun hal tersebut belum berjalan maksimal karena masih banyaknya pelanggaran terkait penerapan aturan protokol kesehatan yang terjadi selama penyelenggaraan, khususnya pada masa kampanye.

Ke empat pasang kandidat yang bertarung di Pilkada kota Makassar tahun 2020, dihadapkan dengan peraturan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta sebisa mungkin tidak melakukan kontak fisik selama tahapan Pilkada berlangsung. Hal tersebut yang membuat kegiatan para kandidat lebih terbatas. Beberapa kegiatan kampanye tatap muka harus dihilangkan dan metode kampanye disesuaikan dengan kondisi pandemi. Meskipun KPU telah mengimbau agar para kandidat lebih mengutamakan metode kampanye virtual, namun kenyataannya para kandidat masih lebih memilih kampanye tatap muka karena dinilai lebih efektif. Sehingga hal tersebut memicu terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.

Sikap patuh maupun abai terhadap aturan protokol kesehatan yang ditunjukkan oleh para kandidat selama mengikuti proses Pilkada merupakan bentuk dari perilaku politik. Perilaku patuh yang ditunjukkan oleh para kandidat berperan besar dalam mengendalikan situasi pandemi karena adanya kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain.

Sebagai wujud hubungannya dengan negara maka tiap individu berperan dalam mematuhi kebijakan politik yang ada. Kepatuhan nya terhadap aturan juga dipengaruhi oleh faktor penekanan atau hukuman serta adanya otoritas yang sah.

2.6 Skema Penelitian

